

**LAPORAN KINERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2023**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara ini memberikan informasi dan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja,**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan target 73,50 persen. Realisasi sebesar 72,94 persen dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 99,24 persen.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dengan target 17,82 persen. Realisasi sebesar 17,82 persen dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100 persen.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan target 7,50 persen. Realisasi sebesar 8,10 persen dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 108 persen.

4. **Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah**

Kinerja sasaran ini diukur berdasarkan indikator Nilai AKIP yang dinilai oleh Inspektorat Daerah, dengan target nilai BB (skor 71,00). Realisasi nilai BB (skor 73,85 ) dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 100 persen.

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.859.491.796,00 dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.089.646.338,00 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 97,15 persen. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 230.154.542,00 atau 2,85%.

Capaian realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum pada Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja,**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 1.820.030.099. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.752.973.600 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96,32 persen.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 1.161.982.675. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.154.016.443 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99,31 persen.

3. **Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 411.400.000. Realisasi anggaran sebesar Rp 409.845.257 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99,62 persen.

4. **Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah**

Anggaran program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp 4.696.233.564. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.542.656.496 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96,73 persen.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dapat tersusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Batu Bara. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan (akuntabilitas) kinerja, sehingga informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun, dan keberhasilan pencapaian kinerja yang diuraikan dalam laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

Demikianlah laporan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dimasa yang akan datang, dan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih.

Talawi, Januari 2024

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Batu Bara**



**Buhari Imran, S.S., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19741125 200604 1 020**

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	1
1.4. Gambaran Umum Organisasi .....	3
1.5. Isu Strategi yang Dihadapi OPD .....	7
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	11
2.3. Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	14
3.2. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.3. Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.4. Realisasi Anggaran .....	30
3.5. Analisis Efisiensi .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
<b>FOTO FOTO DOKUMENTASI .....</b>	<b>39</b>
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....</b>	<b>46</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, peran Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 . Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 72 Tahun 2022 tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

##### **Tugas Pokok**

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

##### **Fungsi**

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di dinas ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta visi dan arah pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan kepada sekretaris para kepala bidang dan unit pelaksana teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang 6 perindustrian serta bidang perdagangan dan kemetrolagian;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala unit kerja di lingkungan sekretariat para kepala bidang dan unit pelaksana teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.3.2. Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara No. 72 Tahun 2022

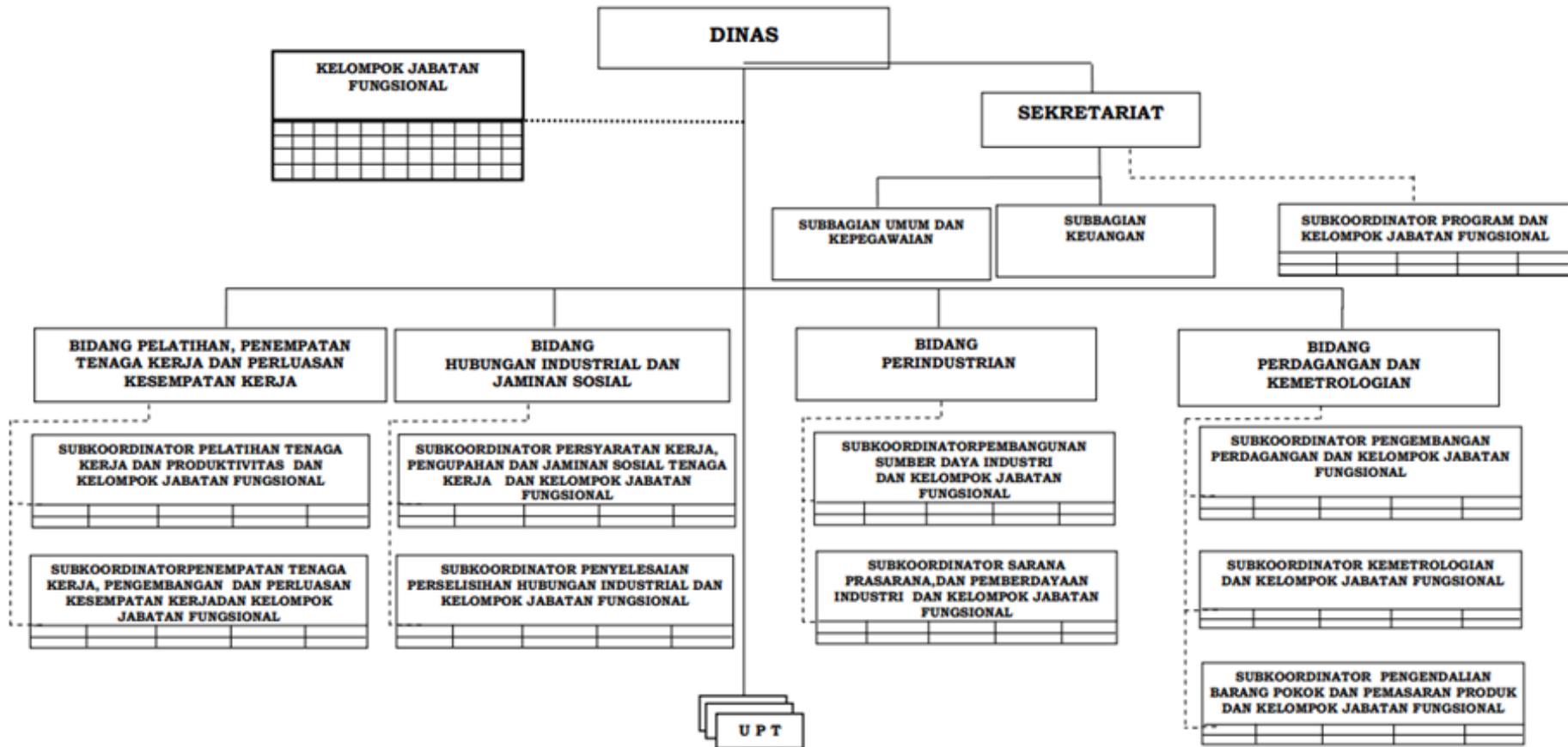
tentang rincian tugas dan fungsi Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbag Umum;
  2. Subbag Keuangan
  3. Subkoordinator Program
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Terdiri dari:
  1. Subkoordinator Pelatihan Tenaga Kerja Dan Produktivitas
  2. Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja, Pengembangan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial, Terdiri dari:
  1. Subkoordinator Persyaratan Kerja, Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  2. Subkoordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
  1. Subkoordinator Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri
  2. Subkoordinator Pembangunan Sumber Daya Industri
- f. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian, terdiri dari :
  1. Subkoordinator Pengembangan Perdagangan
  2. Subkoordinator Pengendalian Barang Pokok dan Pemasaran Produk
  3. Subkoordinator Kemetrolagian
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

GAMBAR 1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATU BARA



#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara didukung oleh personil sebanyak 90 orang (data per akhir Desember 2023). Adapun komposisi jumlah personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
1.	Aparatur Sipil Negara / ASN	36 orang	56,76%	
2.	Non ASN	54 orang	43,24%	
	<b>Total</b>	<b>90 orang</b>	<b>100%</b>	

Khusus untuk personil PNS, dapat dilihat komposisi berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		ASN	CASN	Non ASN	
1	SMA	2	0	41	43
2	D3	4	0	3	7
3	S1	22	4	10	36
4	S2	4	0	0	4
	Jumlah	32	4	54	90

Dari tabel diatas, komposisi pegawai Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara berdasarkan tingkat pendidikannya sudah cukup ideal.

Komposisi PNS dilihat berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Gol I	0	0	0
2	Gol II	4	0	4
3	Gol III	23	4	27
4	Gol IV	5	0	5
Jumlah		32	4	36

Ke depan diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

### 1.5. Isu Strategi Yang Dihadapi OPD

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, serta dinamika permasalahan di lapangan, maka permasalahan utama (*strategic issues*) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dirumuskan antara lain sebagai berikut :

#### a. Bidang Ketenagakerjaan

1. Lapangan pekerjaan yang terbatas
2. Masih tingginya angka jumlah pengangguran
3. Rendahnya informasi bursa kerja yang tersedia secara transparan
4. Masih relatif kecilnya kepedulian perusahaan terhadap Wajib Lapori Lowongan Pekerjaan
5. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
6. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan
7. Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri
8. Kualifikasi/ jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

#### b. Bidang Perindustrian

1. Kapasitas produksi industri kecil menengah masih belum optimal.
2. Pengembangan kualitas produk IKM dan kemasan yang belum maksimal.
3. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.
4. Lemahnya penguasaan desain produk unggulan daerah.
5. Membanjirnya produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif yang mengakibatkan lemahnya daya saing produk
6. Terbatasnya kualitas SDM pelaku usaha industri, perdagangan,
7. Lemahnya kemampuan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam mengakses permodalan

c. Bidang Perdagangan

1. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
2. Perlunya peningkatan pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)
3. Perlunya peningkatan pelayanan kemetrolagian dengan membentuk UPT Metrologi Legal dan penyediaan sarana dan prasarana
4. Perlunya menjaga stabilisasi harga barang pokok strategis dan barang penting lainnya
5. Rendahnya cakupan binaan kelompok pedagang mikro kecil dan eceran
6. Perlunya penataan dan peningkatan sarana pasar rakyat dan pusat pusat perdagangan;
7. Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi
8. Perlunya peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam upaya perlindungan konsumen.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

#### BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 (delapan) misi, dimana Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara mengacu pada misi sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi (Berbudaya)
- b. Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya (Sejahtera)

Selanjutnya berdasarkan dua misi diatas ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dan juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis ini adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Adapun hubungan antara visi dan misi Bupati Batu Bara dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara disajikan dalam gambar berikut ini :

**Tabel 2.1. Tabel Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya	Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif dan berbudaya	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dari sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dari sektor perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
		Mengurangi angka pengangguran	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja
	Misi 1 : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Terciptaya reformasi birokrasi perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Batu Bara**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	$(\text{Jumlah angkatan kerja} / \text{Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas} \times 100\%)$	BPS
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	$(\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan} / \text{Jumlah PDRB Kabupaten}) \times 100\%$	BPS
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	$((\text{Jumlah industri kecil menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil menengah tahun } (n-1)) / \text{Jumlah industri kecil menengah tahun } (n-1)) \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP	Nilai AKIP OPD	Inspektorat

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian

Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,50
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	18,50
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	7,50
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	nilai	BB(71,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.696.233.564	PAPBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.586.030.099	PAPBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	132.350.000	PAPBD
4	Program Hubungan Industrial	101.650.000	PAPBD
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	60.182.675	PAPBD
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	618.000.000	PAPBD
7	Program Pengembangan Ekspor	357.000.000	PAPBD
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	126.800.000	PAPBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	411.400.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>8.089.646.338</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penilaian capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut :

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Teknik pengumpulan data dan teknik monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.2. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
<b>1</b>	<b>Sasaran Strategis Ke - 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja</b>				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ketas}} \times 100\%$	Data eksisting jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas	Recheck data dan perhitungan;koordinasi ke BPS
<b>2</b>	<b>Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian</b>				
	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB Kabupaten}} \times 100\%$	Data eksisting dan perhitungan jumlah PDRB Sektor Perdagangan	Recheck data dan perhitungan;koordinasi ke BPS
<b>3</b>	<b>Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah</b>				
	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Kuantitatif	$\frac{\text{Jumlah industri kecil menengah tahun n} - \text{Jumlah industri kecil menengah tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri kecil menengah tahun (n-1)}} \times 100\%$	Data eksisting dan perhitungan jumlah PDRB Sektor Perdagangan	Recheck data dan perhitungan;kunjungan dan pemantauan ke lapangan
<b>4</b>	<b>Sasaran Strategis Ke – 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>				
	Nilai AKIP OPD	Kualitatif	Nilai	Data Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dari Inspektorat Daerah	Koordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam penilaian akuntabilitas OPD

### 3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,50%	72,94%	99,24%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	18,50%	17,82%	96,32%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	7,50%	8,10%	108%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB(71)	BB(73,85)	104,01%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 seluruhnya masuk dalam kategori sangat baik.

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

Setelah hasil capaian kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran diperoleh, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Sementara analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Analisis merupakan bentuk pengeksplorasian data hasil pengukuran yang diperoleh, dari eksplorasi data tersebut maka akan dapat diketahui beberapa hal penyebab munculnya nilai suatu data hasil pengukuran dan klarifikasi dari munculnya data itu sendiri. Dalam hal ini, analisis capaian kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun Evaluasi dan Analisis untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 3.3.1. Sasaran Strategis Ke - 1 : Terciptanya peningkatan kesempatan kerja

Terciptanya peningkatan kesempatan kerja diukur dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun dan lebih. Berdasarkan Buku Statistik Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang diterbitkan BPS Kabupaten Batu Bara per Desember 2023, komposisi penduduk usia kerja di kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 pada adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Komposisi Penduduk dan Jenis Kelamin 2023**

Komposisi Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa)		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
<b>I. Penduduk usia Kerja</b>	<b>153.498</b>	<b>154.606</b>	<b>308.104</b>
<i>A. Angkatan Kerja</i>	<i>136.453</i>	<i>88.288</i>	<i>224.741</i>
1. Bekerja	129.240	82.297	211.537
2. Pengangguran	7.213	5.991	13.204
<i>B. Bukan Angkatan Kerja</i>	<i>17.045</i>	<i>66.318</i>	<i>83.363</i>
<b>II. % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>5,29%</b>	<b>6,79%</b>	<b>5,88%</b>
<b>III. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>88,90%</b>	<b>57,11%</b>	<b>72,94%</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 72,94% yang diperoleh dari jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 224.741 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 308.104 jiwa.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,50%	72,94%	99,24%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 99,24%. Angka diperoleh dari perbandingan antara realisasi sebesar 72,94% dengan target yang ditetapkan sebesar 73,50%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2022 dan 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2022 terhadap realisasi tahun 2021
Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,50%	72,94%	99,24%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 yang sebesar 72,94% mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 73,50%. Artinya ada penurunan sebesar 0,56% dibandingkan tahun lalu. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan bahwa terjadi penurunan persentase penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra

**Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 dengan Target Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Renstra
Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,00%	72,94%	101,31%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 mencapai 101,31% dari target yang ditetapkan pada Renstra. Artinya capaian realisasi tahun 2023 ini sudah melebihi target Renstra.

4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab penurunan kinerja indikator ini antara lain adalah :

- a. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, hal ini ditandai dengan banyaknya lulusan sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang universitas dan tidak seimbang dengan lowongan kerja yang tersedia dan menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru
- b. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai. Data BPS menyebutkan bahwa tahun 2022, Jumlah penduduk Batu Bara berusia 15 tahun keatas yang bekerja dengan status tidak/belum pernah sekolah, tidak/belum tamat SD dan hanya tamat sampai SD sederajat, yakni sebanyak 81.539 orang dari 213.913 orang penduduk yang bekerja. Persentase kelompok ini mencapai 38,12 %
- c. Kualifikasi dan kompetensi pencari kerja belum sepenuhnya cocok dengan kebutuhan pasar kerja

- d. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Sedangkan Lapangan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan penambahan angkatan kerja

**a. Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian**

Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian diukur dari capaian kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB.

Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Kabupaten Batu Bara menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 17 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dalam hal ini perhitungan PDRB yang dipakai adalah PDRB atas harga berlaku.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Pengukuran terhadap kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.8. Data kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	17,89%	17,82%	17,82%*

Dalam pengukuran indikator ini, Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara masih mengacu pada angka PDRB sektor perdagangan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara. Nilai realisasi kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB kabupaten tahun 2023 untuk sementara masih menggunakan data asumsi tahun 2022 sebesar 17,82%, karena data resmi terkait PDRB Kabupaten Batu Bara tahun 2023 belum dirilis.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.9. Perbandingan Target dan Realisasi Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	18,50%	17,82%*	96,32%

\*Data sementara

Berdasarkan hasil pengukuran, kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB adalah sebesar 17,82%. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB sebesar 96,32%. Angka ini merupakan perbandingan antara realisasi sebesar 17,82% dengan target yang ditetapkan sebesar 18,50%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.10. Realisasi Kinerja Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Tahun 2022 dan 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	17,82%	97,38%	17,82%*	96,32%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tahun 2022 adalah sebesar 17,89%.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra

**Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Tahun 2022 dengan Target Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi 2023 Terhadap Target Renstra
1.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	18,80%	17,82%	94,79%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tahun 2022 sebesar 94,79% terhadap target realisasi pada akhir tahun renstra.

4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja untuk indikator ini antara lain adalah:

Faktor penghambat keberhasilan indikator ini adalah :

- a. belum maksimalnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan khususnya pasar rakyat
- b. tingginya fluktuasi harga barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi inflasi daerah dan daya beli masyarakat
- c. belum optimalnya pelaksanaan peningkatan tertib niaga dan tertib ukur karena terbatasnya anggaran operasional pelayanan dan SDM penera dan pengawas penera alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Merevitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pasar tradisional.
- c. Melakukan monitoring dan pemantauan harga barang pokok kebutuhan masyarakat
- d. Melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga barang pokok dan barang strategis kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur serta pengawasan kemetrolagian dalam upaya peningkatan tertib niaga dan tertib ukur

### **c. Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)**

Berdasarkan Permenperin Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, dinyatakan pada pasal 3 bahwa defenisi Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sementara pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Industri Menengah adalah industri yang memenuhi ketentuan mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan

belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)

Sasaran meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah diukur dari capaian persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah. Pengukuran terhadap pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.12. Data Jumlah Industri Kecil dan Menengah (unit)**

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Jumlah industri kecil dan menengah	603	637	679	734

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 55 unit atau tumbuh sebesar 8,10%.

Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

**Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	7,50%	8,10%	108%

Berdasarkan hasil pengukuran, jumlah kenaikan jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 ada sebanyak 55 unit atau tumbuh sebesar 8,10% dari jumlah industri kecil menengah tahun lalu. Artinya capaian indikator persentase pertumbuhan industri kecil menengah terhadap target yang ditetapkan adalah sebesar 108%. Angka ini merupakan perbandingan antara realisasi sebesar 8,10% dengan target yang ditetapkan sebesar 7,50%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

**Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023 dengan Tahun Lalu**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	6,60%	8,10%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian peningkatan pertumbuhan industri pada tahun 2023 sebesar 8,10% lebih besar dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,60%, tetapi realisasi pertumbuhan industri kecil menengah tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra

**Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah dengan Target Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Realisasi s.d Tahun 2023
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	10%	8,10 %	81,00%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2023 masih mencapai 81,00% dari target realisasi pada akhir tahun renstra.

4. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adalah :

- a. Kurangnya permodalan pelaku Industri Kecil dan Menengah
- b. Kurangnya kemampuan skill dan kemampuan teknis pelaku IKM

- c. Kurangnya akses pelaku IKM untuk memasarkan produknya
- d. Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku Industri Kecil dan Menengah
- e. Kurangnya penggunaan teknologi dan peralatan produksi yang efektif dan efisien

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah antara lain adalah :

- a. Bahan baku yang cukup memadai
- b. Tenaga kerja yang cukup potensial .

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- a. Memfasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas industri kecil menengah dari sisi akses permodalan, kompetensi SDM, teknologi dan peralatan produksi maupun pemasaran produk IKM.
- b. Melakukan pendampingan dalam permasalahan proses produksi IKM

#### **d. Sasaran Strategis Ke - 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dari capaian Nilai AKIP OPD yang dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara. Pengukuran terhadap Nilai AKIP OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 menunjukkan kategori BB (Baik) dengan nilai sebesar 73,85 ( Tujuh Puluh Tiga Koma Delapan Pulluh Lima ) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.16. Penilaian Akuntabiitas Kinerja Tahun 2023**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	24,80
2	Pengukuran Kinerja	30	22,40
3	Pelaporan Kinerja	15	11,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>73,85</b>
<b>Predikat</b>			<b>BB</b>

**Tabel 3.17. Data Nilai AKIP OPD Tahun 2021-2023**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Nilai AKIP OPD	-	B (67,55)	BB (73,85)

Nilai AKIP OPD Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah BB dengan skor 73,85.

*1. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra*

Nilai AKIP OPD Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara pada tahun akhir renstra ditargetkan mendapat nilai BB (Nilai >70-80) . Realisasi Nilai AKIP OPD tahun 2023 adalah nilai BB dengan skor 73,85. Pencapaian nilai AKIP OPD tahun 2023 secara kategori sudah mencapai target yakni nilai BB. Bahkan secara nilai nominal melebihi target yang ditetapkan.

*2. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan alternative solusi yang telah dilakukan.*

Beberapa catatan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Tidak terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Belum terdapat cross cutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
3. Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja
4. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)
5. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
6. Laporan Kinerja belum dipublikasikan
7. Realisasi kinerja skala nasional / internasional pada Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan belum membandingkan dengan level nasional

8. Masih kurangnya informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Laporan Kinerja
9. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan SDM yang memadai
10. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memanfaatkan teknologi informasi

Beberapa hasil penilaian, Inspektorat Kabupaten Batu Bara merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Membuat cross cutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
3. Membuat SOP pengumpulan data kinerja
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja
5. Mengimplementasikan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
6. Membuat dokumentasi yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja
7. Mempublikasikan Laporan Kinerja
8. Menginformasikan ada/tidak realisasi kinerja skala nasional /internasional pada Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan ke dalam Laporan Kinerja
9. Mengikuti sosialisasi maupun pelatihan agar terciptanya SDM yang memadai dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
10. Memanfaatkan teknologi informasi dalam evaluasi akuntabilitas internal

### **3.4. Realisasi Anggaran**

Untuk mencapai kinerja indikator ini didukung oleh program kegiatan yang telah dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketenagakerjaan  
Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Tahun 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	TERCIPTANYA PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.586.030.099</b>	<b>1.469.022.200</b>
		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.286.030.099</b>	<b>1.230.839.600</b>
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	146.030.099	144.897.900
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.140.000.000	1.085.941.700
		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	300.000.000	300.000.000
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>132.350.000</b>	<b>131.394.000</b>
		<b>Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.650.000</b>	<b>28.627.000</b>
		Pelayanan antar Kerja	28.650.000	28.627.000
		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103.700.000</b>	<b>102.767.000</b>
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	103.700.000	102.767.000
		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>101.650.000</b>	<b>90.740.000</b>
		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.700.000</b>	<b>22.290.000</b>
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22.700.000	22.290.000
		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>78.950.000</b>	<b>68.450.000</b>

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Tahun 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.750.000	26.190.000
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50.200.000	42.260.000
<b>Sub Total Sasaran 1</b>			<b>1.820.030.099</b>	<b>1.639.116.200</b>
<b>2</b>	<b>MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BAGI PEREKONOMIAN</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>60.182.675</b>	<b>33.473.800</b>
		<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>60.182.675</b>	<b>59.631.800</b>
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	60.182.675	59.631.800
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>618.000.000</b>	<b>571.205.000</b>
		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>342.000.000</b>	<b>341.205.000</b>
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	342.000.000	341.205.000
		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>276.000.000</b>	<b>276.000.000</b>
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	276.000.000	276.000.000
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>357.000.000</b>	<b>356.120.373</b>
		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>357.000.000</b>	<b>356.120.373</b>
		Pameran Dagang Lokal	357.000.000	356.120.373
		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>126.800.000</b>	<b>121.059.270</b>

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Tahun 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>126.800.000</b>	<b>121.059.270</b>
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	126.800.000	121.059.270
<b>Sub Total Sasaran 2</b>			<b>1.161.982.675</b>	<b>1.154.016.443</b>
<b>3</b>	<b>MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>411.400.000</b>	<b>409.845.257</b>
		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>411.400.000</b>	<b>409.845.257</b>
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	200.000.000	199.945.257
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	81.400.000	80.600.000,
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	130.000.000	129.300.000
<b>Sub Total Sasaran 3</b>			<b>411.400.000</b>	<b>365.207.257</b>
<b>4</b>	<b>MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4.696.233.564</b>	<b>4.065.037.907</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.700.000</b>	<b>25.700.000</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.700.000	15.700.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000	10.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	0
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.803.722.943</b>	<b>3.781.906.221</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.803.722.943	3.772.906.221
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.000.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>228.209.671</b>	<b>166.700.532</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.999.590	2.990.000

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Tahun 2023	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.157.996	33.392.250
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.250.000	15.175.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.202.085	12.180.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000
		Penyediaan Bahan/Material		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.600.000	90.963.282
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>545.530.950</b>	<b>535.922.956</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.900.000	5.900.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.360.950	79.332.956
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.270.000	450.690.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.070.000</b>	<b>32.426.787</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	26.426.787
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.070.000	6.000.000
<b>Sub Total Sasaran 4</b>			<b>4.696.233.564</b>	<b>4.542.656.496</b>
<b>Total</b>			<b>8.089.646.338</b>	<b>7.859.491.796</b>
<b>Sisa Anggaran (Silpa)</b>			<b>230.154.542</b>	
<b>Persentase Serapan Anggaran</b>			<b>97,15%</b>	

Capaian realisasi anggaran belanja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Tahun anggaran 2023 adalah sebesar 97,15% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.089.646.338 dan realisasi sebesar Rp. 7.859.491.796. Sisa anggaran/ Silpa sebesar Rp. 230.154.542.

Selain anggaran belanja, pada tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan mengelola anggaran pendapatan melalui retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Kios dan Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dengan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Kios	500.000.000	312.329.000	62,47
2	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	50.000.000	64.821.100	129,64
	<b>Jumlah</b>	<b>550.000.000</b>	<b>377.150.100</b>	<b>68,57</b>

Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran pendapatan adalah sebesar 68,57 persen dimana dari anggaran sebesar Rp. 550.000.000 terealisasi sebesar Rp. 377.150.100. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena realisasi retribusi kios agak rendah yakni sebesar 62,47 persen. Hal ini disebabkan karena penetapan target retribusi kios yang kurang realistis dan tidak sesuai dengan jumlah kios/los sebagai objek retribusi yang dikelola. Selain itu beberapa pedagang sebagai pengguna kios/los masih ada yang menunggak pembayaran retribusi.

Sementara itu untuk pencapaian Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya melebihi target yang ditetapkan yakni 129,64 persen. Dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp. 64.821.100.

### **3.5. Analisis Efisiensi**

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output kegiatan. Semakin sedikit anggaran untuk mencapai output maksimal berarti nilai efisiensi semakin tinggi, atau dapat dikatakan kalau rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan berarti penggunaan anggaran efisien. berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk tahun 2023.

**Tabel 3.19. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	73,50 %	72,94 %	99,24 %	1.820.030.099	1.639.116.200	96,32
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	18,50 %	17,82 %	96,32 %	1.161.982.675	1.154.016.443	99,31
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	7,50%	8,10%	108%	411.400.000	365.207.257	99,62
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB(71)	BB (73,85)	100%	4.696.233.564	4.542.656.496	96,73

**Tabel 3.20. Analisis Efisiensi Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	99,24	96,32	Efisien
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	96,32	99,31	Tidak efisien
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	108	99,62	Efisien
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	100	96,73	Efisien

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2023.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi akan menjadi tidak memiliki makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara.

Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja di Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara :

- a. Meningkatkan kapasitas produksi industri kecil menengah masih belum optimal.
- b. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan branding, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.

- d. Meningkatkan kualitas desain produk unggulan daerah
- e. meningkatkan pelayanan kemetrollogian daerah
- f. Menata dan memberdayakan sentra industri kecil menengah (IKM)
- g. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi industri kecil dan menengah potensial
- h. Melakukan penataan tempat berusaha pedagang kecil
- i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat
- j. Meningkatkan kualitas manajemen usaha pedagang pasar dan informal
- k. Melaksanakan Pelatihan kerja berdasarkan Unit Kompetensi
- l. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- m. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- n. Fasilitasi Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- o. Melakukan Pengukuran Produktivitas Tenaga kerja
- p. Fasilitasi Pelayanan Antar kerja
- q. Fasilitasi Perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- r. Fasilitasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- s. Fasilitasi Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)
- t. Fasilitasi Penerbitan Perpanjangan IMTA
- u. Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
- v. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

**Talawi, Januari 2024**

**Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Batu Bara**

**Buhari Imran, S.S., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19741125 200604 1 020**

## FOTO FOTO DOKUMENTASI

### 1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Operator Komputer



## 2. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



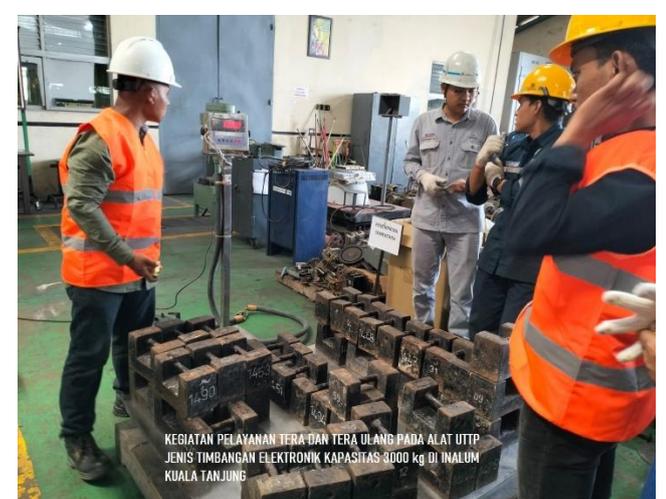
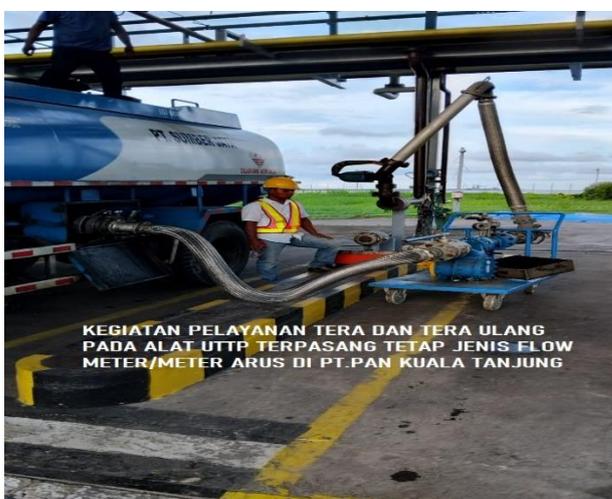
## 3. Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten



#### 4. Pelatihan IKM Pembuatan Briket Berbahan Baku Batok Kelapa



## 5. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur





KEGIATAN PENGAWASAN ALAT UTTP TERPASANG TETAP JENIS PUBBM BEKERJASAMA DENGAN BADAN STANDARDISASI METROLOGI LEGAL I-MEDAN DI SPBU KECAMATAN AIR PUTIH

4 Des 2023 09.17.42  
 215 Jalan Lintas Sumatra  
 Sipare-Pare  
 Kecamatan Air Putih  
 Kabupaten Batu Bara  
 Sumatera Utara



KEGIATAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG PADA ALAT UTTP TERPASANG TETAP JENIS PUBBM DI SPBU KEC. SEI BALAI



KEGIATAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG JENIS ALAT UTTP SENTISIMAL DI PKS SOCFINDO-LIMA PULUH



KEGIATAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG PADA ALAT UTTP TERPASANG TETAP JENIS PUBBM DI SPBU KEC. MEDANG DERAS

## 6. Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)



KEGIATAN PENGAWASAN ALAT UTTP TERPASANG TETAP JENIS PUBBM BEKERJASAMA DENGAN BADAN STANDARDISASI METROLOGI LEGAL I-MEDAN DI SPBU KECAMATAN SEI SUKA

5 Des 2023 09.22.45  
 Tanjung Seri  
 Kecamatan Sei Suka  
 Kabupaten Batu Bara  
 Sumatera Utara



KEGIATAN PENGAWASAN TAKARAN PADA ALAT UTTP TERPASANG TETAP JENIS PUBBM BERSAMA-SAMA DENGAN JAJARAN POLRES BATU BARA

## 7. Kegiatan Sidang Tera dan Tera Ulang di Pasar Rakyat



## 8. Kegiatan Pembubuhan Cap Tanda Tera pada Alat Ukur



## 9. Kegiatan Pengawasan Barang Kena Cukai Illegal



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. ZAHIR, MAP**  
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**BUPATI BATU BARA**



**Ir. H. ZAHIR, MAP**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DISNAKER, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19741125 200604 1 020

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Terciptanya peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,50
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	18,50
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	7,50
4	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (71,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.696.233.564	PAPBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.586.030.099	PAPBD
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	132.350.000	PAPBD
4	Program Hubungan Industrial	101.650.000	PAPBD
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	60.182.675	PAPBD
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	618.000.000	PAPBD
7	Program Pengembangan Ekspor	357.000.000	PAPBD
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	126.800.000	PAPBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	411.400.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>8.089.646.338</b>	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**BUPATI BATU BARA**  
  
**Ir. H. ZAHIR, MAP**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DISNAKER, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATU BARA**  
  
**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDHAM KHALID, SH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**SEKRETARIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**IDHAM KHALID, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710613 199401 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
SEKRETARIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	nilai	BB (71,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.696.233.564	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>4.696.233.564</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**SEKRETARIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**IDHAM KHALID, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710613 199401 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPARMAN, S.Pd, M.Si.**  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IDHAM KHALID, SH.**  
Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

Pihak Pertama,  
**KASUBBAG UMUM  
DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**IDHAM KHALID, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710613 199401 1 001

**SUPARMAN, S.Pd, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670904 199303 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	240
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
<b>2</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>SATUAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
<b>3</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>228.209.671</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.590	PAPBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.157.996	PAPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.250.000	PAPBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.202.085	PAPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	PAPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.600.000	PAPBD
2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>545.530.950</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.900.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.360.950	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.270.000	PAPBD
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.070.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	PAPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.070.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>73.070.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA**



**IDHAM KHALID, SH**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19710613 199401 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 DINAS KETENAGAKERJAAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA**



**SUPARMAN, S.Pd, M.Si.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19670904 199303 1 002



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. YAHMIN, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : **KASUBBAG KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IDHAM KHALID, SH**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN  
PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**IDHAM KHALID, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710613 199401 1 001

Pihak Pertama,  
**KASUBBAG KEUANGAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**M. YAHMIN, S.Pd, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19820329 200903 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KASUBBAG KEUANGAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	42
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.813.722.943	PAPBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.803.722.943	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>3.813.722.943</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**IDHAM KHALID, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710613 199401 1 001

Pihak Pertama,  
**KASUBBAG KEUANGAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**M. YAHMIN, S.Pd, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19820329 200903 1 004



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONALD J. SITUMORANG, ST**  
Jabatan : PERECANA AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IDHAM KHALID, SH**  
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**IDHAM KHALID, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710613 199401 1 001

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**DONALD J. SITUMORANG, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810825 200804 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
PERECANA AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang Terlaksana</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.700.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.700.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	PAPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>35.700.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA**



**IDHAM KHALID, SH**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19710613 199401 1 001

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI PROGRAM  
 DINAS KETENAGAKERJAAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA**



**DONALD J. SITUMORANG, ST**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19810825 200804 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAKARIA MATOGU, S.SOS**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG PELATIHAN,  
PENEMPATAN KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**ZAKARIA MATOGU, S.SOS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19801018 201101 1 011

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja yang lulus uji kompetensi	%	80
2	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan di dalam dan luar negeri	Orang	1000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.440.000.000	PAPBD
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	132.350.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.572.350.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG PELATIHAN,  
PENEMPATAN KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**ZAKARIA MATOGU, S.SOS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19801018 201101 1 011



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHERI, S.M.**

Jabatan : INSTRUKTUR AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI  
PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ZAKARIA MATOGU, S.Sos.**

Jabatan : KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN KERJA  
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG PELATIHAN,  
PENEMPATAN KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ZAKARIA MATOGU, S.SOS**  
Penata Tk. I  
NIP. 19801018 201101 1 011

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI PELATIHAN  
TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SUHERI, S.M.**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19790613 201001 1 020

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
INSTRUKTUR AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI  
PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Orang</b>	<b>16</b>
	Tersedianya Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Paket	2
<b>2.</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina</b>	<b>Lembaga</b>	<b>25</b>
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Lembaga	25
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan antar kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui layanan antar kerja</b>	<b>Orang</b>	<b>500</b>
	Terwujudnya pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	500
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah CPMI/PMI (pra dan purna penempatan) yang dilindungi dan diberdayakan</b>	<b>Orang</b>	<b>40</b>
	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40

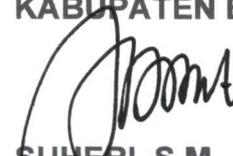
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.140.000.000	PAPBD
2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	300.000.000	PAPBD
3	<b>Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.650.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Pelayanan antar Kerja	28.650.000	PAPBD
4	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103.700.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	103.700.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.572.350.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA BIDANG PELATIHAN,  
 PENEMPATAN KERJA  
 DAN PERLUASAN KESEMPATAN  
 KERJA DISNAKER PERINDAG  
 KABUPATEN BATU BARA**

  
**ZAKARIA MATOGU, S.SOS**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19801018 201101 1 011

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI PELATIHAN  
 TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS  
 DISNAKER PERINDAG  
 KABUPATEN BATU BARA**

  
**SUHERI, S.M.**  
 Penata Muda Tk. I  
 NIP. 19790613 201001 1 020



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
JAMINAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG HUBUNGAN  
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750413 201001 1 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha	Persentase penanganan perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha yang ditindaklanjuti	%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Hubungan Industrial	101.650.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>101.650.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG HUBUNGAN  
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750413 201001 1 007



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
SUBSTANSI DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NENENG WAHYUNI, SKM**  
Jabatan : INSTRUKTUR AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI  
PERSYARATAN KERJA, PENGUPAHAN DAN JAMINAN  
SOSIAL TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Jabatan : KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN JAMINAN SOSIAL  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

**AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750413 201001 1 007

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI PERSYARATAN  
KERJA, PENGUPAHAN DAN JAMINAN  
SOSIAL TENAGA KERJA  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

**NENENG WAHYUNI, SKM**  
Penata  
NIP. 19770208 200604 2 017

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
INSTRUKTUR AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI PERSYARATAN KERJA,  
PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama	Perusahaan	30
	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	22.700.000	PAPBD
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	22.700.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>22.700.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN JAMINAN SOSIAL  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**



**AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750413 201001 1 007

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PERSYARATAN KERJA,  
PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL  
TENAGA KERJA  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**



**NENENG WAHYUNI, SKM**  
Penata  
NIP. 19770208 200604 2 017



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISNIARDI ,S.E**

Jabatan : **INSTRUKTUR AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**

Jabatan : **KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN JAMINAN SOSIAL  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

**AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750413 201001 1 007

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL DISNAKER  
PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

**ISNIARDI, S.E**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19830916 201001 1 021

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
INSTRUKTUR AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Terwujudnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah dan diselesaikan	Persen	90
	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	50
	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>78.950.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.750.000	PAPBD
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50.200.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>78.950.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN JAMINAN SOSIAL  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**



**AKHYARUDDIN MATONDANG, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19750413 201001 1 007

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**



**ISNIARDI, S.E**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19830916 201001 1 021



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHELA, S.P., M.Si.**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

**ROHELA, S.P., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19781205 201001 2 014

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesesuaian pembangunan industri daerah berdasarkan RPIK	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan industri daerah berdasarkan RPIK	%	50

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	411.400.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>411.400.000</b>	

Talawi, 09 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS  
KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**ROHELA, S.P., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19781205 201001 2 014



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARY SANDY SYAHPUTRA, SE**  
Jabatan : **ASSESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA /  
KETUA TIM SUBSTANSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA  
INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROHELA, SP, M.Si**  
Jabatan : **KABID PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

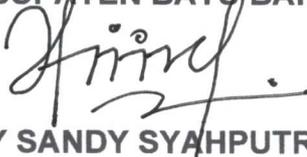
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERINDUSTRIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ROHELA, SP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19781205 201001 2 014

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA  
INDUSTRI DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ARY SANDY SYAHPUTRA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19861118 201101 1 011

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
 ASSESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA / KETUA TIM  
 SUBSTANSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI  
 DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA  
 TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	<b>Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>281.400.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	200.000.000	PAPBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	81.400.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>281.400.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERINDUSTRIAN  
 DISNAKER PERINDAG  
 KABUPATEN BATU BARA**

  
**ROHELA, SP., M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19781205 201001 2 014

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI PEMBANGUNAN  
 SUMBER DAYA INDUSTRI DISNAKER  
 PERINDAG KABUPATEN BATU BARA**

  
**ARY SANDY SYAHPUTRA, SE**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19861118 201101 1 011



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IQBAL, S.Sos, M.AP**  
Jabatan : **PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROHELA, SP., M.Si**  
Jabatan : **KABID PERINDUSTRIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERINDUSTRIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ROHELA, SP., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19781205 201001 2 014

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI SARANA  
PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**MUHAMMAD IQBAL, S.Sos, M.AP**  
Pembina  
NIP. 19830108 201001 1 019

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA / KETUA  
TIM SUBSTANSI SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1

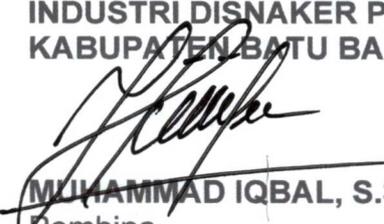
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	130.000.000	PAPBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	130.000.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>130.000.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERINDUSTRIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ROHELA, SP., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19781205 201001 2 014

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI SARANA  
PRASARANA, DAN PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**MUHAMMAD IQBAL, S.Sos, M.AP**  
Pembina  
NIP. 19830108 201001 1 019



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA DINAS**  
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



  
**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN  
DAN KEMETROLOGIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Pembina  
NIP. 19770413 200804 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDUSTRIAN DAN PERGADANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Menurunnya penggunaan bahan berbahaya dalam makanan oleh pelaku usaha	Persentase penurunan penggunaan bahan berbahaya dalam makanan oleh pelaku usaha	%	80
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya	unit	2
	Meningkatnya kualitas pengelola pasar rakyat	Jumlah pengelola pasar rakyat yang kompeten	orang	21
3	Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah	Persentase peningkatan ekspor produk unggulan daerah	%	100
4	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perdagangan dalam pelaksanaan tertib ukur ketika bertransaksi	persentase pelaku usaha yang taat peraturan dalam penerapan tertib niaga dan tertib	%	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	60.182.675	PAPBD
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	618.000.000	PAPBD
3	Program Pengembangan Ekspor	357.000.000	PAPBD
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	126.800.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.161.982.675</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN  
 DAN KEMETROLOGIAN  
 DINAS KETENAGAKERJAAN,  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN BATU BARA**



**SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
 Pembina  
 NIP. 19770413 200804 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUINDRA, ST**  
Jabatan : **PENERA AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI  
KEMETROLOGIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Jabatan : **KABID PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERDAGANGAN  
DAN KEMETROLOGIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19770413 200804 1 001

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
KEMETROLOGIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SUINDRA, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19830309 201001 1 031

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
PENERA AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI KEMETROLOGIAN  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	<b>Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasannya</b>	<b>Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang berlaku</b>	Laporan	1
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	700

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>126.800.000</b>	<b>PAPBD</b>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	126.800.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>126.800.000</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERDAGANGAN  
DAN KEMETROLOGIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19770413 200804 1 001

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
KEMETROLOGIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SUINDRA, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19830309 201001 1 031



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA TIM  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALIYUS SAFRI SAMAN, SST**  
Jabatan : **PENGUJI MUTU BARANG AHLI MUDA / KETUA TIM  
SUBSTANSI PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN  
PEMASARAN PRODUK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Jabatan : **KABID PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERDAGANGAN DAN  
KEMETROLOGIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19770413 200804 1 001

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PENGENDALIAN BARANG POKOK  
DAN PEMASARAN PRODUK  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**ALIYUS SAFRI SAMAN, SST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19820524 201001 1 027

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
PENGUJI MUTU BARANG AHLI MUDA / KETUA TIM SUBSTANSI  
PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PEMASARAN PRODUK  
DINAS KETENAGAKERJAAN PERINDSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>
	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana fisik pasar rakyat</b>	<b>Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi</b>	<b>Unit</b>	<b>3</b>
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelola pasar rakyat</b>	<b>Jumlah pengelola pasar rakyat yang kompeten</b>	<b>Orang</b>	<b>23</b>
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1
<b>4</b>	<b>Jumlah pameran promosi dagang yang diikuti</b>	<b>Jumlah produk ekspor unggulan yang dipromosikan</b>	<b>Produk</b>	<b>20</b>
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku usaha	20

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	60.182.675	PAPBD
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (PB2)	60.182.675	PAPBD
2	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	342.000.000	PAPBD
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	342.000.000	PAPBD
3	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	276.000.000	PAPBD
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	276.000.000	PAPBD
4	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	357.000.000	PAPBD
	Pameran Dagang Lokal	357.000.000	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>1.035.182.675</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KABID PERDAGANGAN DAN  
KEMETROLOGIAN  
DISNAKER PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**



**SAHAT S. R. TP BOLON, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19770413 200804 1 001

Pihak Pertama,  
**KETUA TIM SUBSTANSI  
PENGENDALIAN BARANG POKOK  
DAN PEMASARAN PRODUK DISNAKER  
PERINDAG  
KABUPATEN BATU BARA**



**ALIYUS SAFRI SAMAN, SST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19820524 201001 1 027



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIBOWO BUDI RAHARJO, S.T.**  
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUHARI IMRAN, S.S., M.Si.**  
Jabatan : **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**BUHARI IMRAN, S.S., M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

  
**WIBOWO BUDI RAHARJO, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19740324 200903 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI  
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	<b>Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>Orang</b>	<b>16</b>
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>146.030.099</b>	<b>PAPBD</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	146.030.099	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>146.030.099</b>	

Talawi, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**BUHARI IMRAN, S.S, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741125 200604 1 020

Pihak Pertama,  
**KEPALA UPTD BALAI  
LATIHAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN,  
PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BATU BARA**



**WIBOWO BUDI RAHARJO, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19740324 200903 1 004